

**EFEKTIVITAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA (LTSA-P2MI) JAWA TIMUR**

**Dewi Ayu Puspitasari<sup>1</sup>, Kendry Widiyanto<sup>2</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [dwayupsptsr@gmail.com](mailto:dwayupsptsr@gmail.com) , [kenronggo@untaag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untaag-sby.ac.id)

**ABSTRAK**

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan pemerintah menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pencari kerja. Namun, keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat banyak masyarakat Indonesia memilih bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menangani tenaga kerja dan transmigran di wilayah tersebut, berupaya membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI). Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah menciptakan efektivitas dalam pemberian layanan administrasi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh calon maupun mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Jawa Timur. Dengan adanya LTSA-P2MI, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dan bantuan pengurusan dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

**Kata kunci:** Efektivitas, LTSA-P2MI, Pekerja Migran

**ABSTRACT**

*The increasing population in Indonesia has placed greater demands on the government to provide sufficient job opportunities for job seekers. However, the limited availability of domestic employment has led many Indonesians to seek work abroad to meet their living needs. To address this issue, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, as the institution responsible for managing labor and transmigration in the region, has taken strategic steps to reduce unemployment and improve the standard of living by establishing the Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI). The objective of this community service activity is to enhance the effectiveness of administrative services for documents required by prospective and former Indonesian Migrant Workers in the East Java region. With the presence of LTSA-P2MI, the public can easily access information and obtain assistance in processing the necessary documents to work abroad in compliance with established procedures.*

**Keywords :** Effectiveness, LTSA-P2MI, Migrant Workers

**PENDAHULUAN**

Pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai indikator penting dalam menilai tingkat ekonomi suatu negara, pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang berada dalam usia kerja tidak atau belum memiliki pekerjaan. Masalah pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi secara lebih luas.

Jumlah penduduk yang terus meningkat di Indonesia semakin menambah tuntutan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat atau pencari kerja. Disisi lain, konsep pembangunan nasional Indonesia salah satunya meliputi pengembangan sumber

daya manusia serta terciptanya kesejahteraan rakyat yang didukung oleh terciptanya lapangan pekerjaan.

Menurut Risky Raymundus (2020), Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu maju. Untuk mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera, pembangunan nasional harus berorientasi pada pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Bab 1 Pasal 1(2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau orang lain. Tenaga kerja dapat dikatakan apabila individu yang mampu bekerja dan memasuki usia kerja, dengan batas usia kerja yang berlaku di Indonesia yaitu 15-64 tahun. Penyelenggaraan layanan pemerintah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja sangat penting untuk kemajuan suatu negara.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang berperan dalam pengelolaan tenaga kerja dan transmigrasi di wilayah Jawa Timur. Dengan tujuan utama untuk mendukung misi Kepala Daerah Jawa Timur no 2 yaitu, terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Selain itu, Disnakertrans juga berupaya memperluas akses informasi mengenai peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mencari pekerjaan. Upaya ini tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan pekerja migran. Melalui program-program pembinaan dan perlindungan hukum, Disnakertrans berusaha memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari segi upah, kesehatan, maupun kondisi kerja untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan. Salah satunya yaitu melalui pembentukan UPT. Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jatim.

Peraturan Gubernur Jatim Nomor 62 Tahun 2018 Bab VI Pasal 21 menyebutkan bahwa, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam pelayanan, termasuk pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian tenaga kerja luar negeri yang biasa disebut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Pelaksanaan tugas ini harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk pra dan purna penempatan, tugas ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat.

UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jawa Timur melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung pelayanan dan perlindungan tenaga kerja di wilayahnya. Salah satu fokus utama mereka adalah penyuluhan dan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja tentang hak-hak dan kewajiban mereka untuk memastikan pentingnya keselamatan kerja, menyediakan pelayanan administrasi bagi CPMI atau PMI yang ingin mengajukan dokumen-dokumen untuk kepentingan tertentu, dan melindungi hak-hak pekerja dengan menawarkan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu, P2TK menyediakan layanan konsultasi bagi pekerja dan pengusaha terkait isu-isu ketenagakerjaan, termasuk perselisihan industrial dan upah, yang membantu menciptakan solusi yang adil melalui SIMPADU-PMI.

Kegiatan pengabdian di UPT. Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) memiliki tanggung jawab untuk membantu optimalisasi kegiatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja migran agar dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diawasi secara langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Tujuan melaksanakan kegiatan pengabdian ini adalah agar memahami proses kegiatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja dilingkup UPT. P2TK, dengan harapan masyarakat Jawa Timur kedepannya sadar akan pentingnya bekerja diluar negeri secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan agar terciptanya lingkungan kerja aman, produktif dan adil.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di UPT. Pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jawa Timur yang berlangsung selama 40 hari terhitung mulai dari tanggal 09 September 2024 s/d 01 November 2024 dengan hari kerja Senin-Jum'at. Pada pelaksanaannya melalui beberapa tahap an sebelum terjun langsung melaksanakan kegiatan pengabdian ini, adapun beberapa tahapannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, tahap awal dalam kegiatan ini ialah melakukan observasi guna menanyakan ketersediaan kuota ditempat pengabdian yaitu UPT. P2TK Disnakertrans Jatim. *Kedua*, setelah mengetahui ketersediaan kuota magang ditempat pengabdian, mahasiswa melakukan persiapan dan pengajuan dokumen yang dibutuhkan berupa proposal pengajuan magang, *curriculum vitae*, serta surat pengantar magang dari universitas. *Ketiga*, setelah mendapatkan surat balasan dari instansi terkait mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian yang dimulai sejak 09 september 2024 s/d 01 November 2024.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian di UPT. Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jatim ialah efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI) Jawa Timur. Efektivitas yaitu mengacu pada konsep efektivitas organisasi yang mencakup seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator pengukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" yaitu: *Pertama*, Pencapaian Tujuan yang merupakan proses keseluruhan upaya dalam pencapaian tujuan. *Kedua*, Integrasi yang merupakan tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi, serta pembangunan konsensus. *Ketiga*, Adaptasi yang menitikberatkan kemampuan organisasi dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Pelaksanaan kegiatan magang ini pada bidang pendamping Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI) bertujuan agar terciptanya efektivitas dalam pemberian layanan administrasi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan calon atau maupun mantan PMI di satuan wilayah Jawa Timur terutama pada pembuatan ID CPMI, rekam paspor, penghapusan status PMI, pengaduan dan informasi kerja, serta pengecekan data administrasi kependudukan.

## HASIL dan PEMBAHASAN

Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI) di Jawa Timur adalah sebuah bentuk pelayanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada pekerja migran Indonesia. LTSA-P2MI berfungsi sebagai pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari informasi tentang peluang kerja di luar negeri, prosedur perekrutan, pengurusan dokumen-dokumen pekerja, hingga perlindungan hak-hak pekerja migran.

Sejarah berdirinya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), di Jawa Timur dimulai dari Tahun 2000-an dengan inisiasi didirikannya kantor Pelayanan Bersama (Samsat) Tenaga Kerja Indonesia. Pada Tahun 2015, berdasar Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan amanah Permenaker No 30 Tahun 2016, Jawa Timur dibantu Kemnaker RI Penyelenggara

mendirikan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PLTSA-PTKLN) sebagai upaya perbaikan tatakelola penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Bersama di Jawa Timur, inisiasi awal pendirian PLTSA-PTKLN selain di Jawa Timur juga didirikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kab. Provinsi Gianyar Bali.

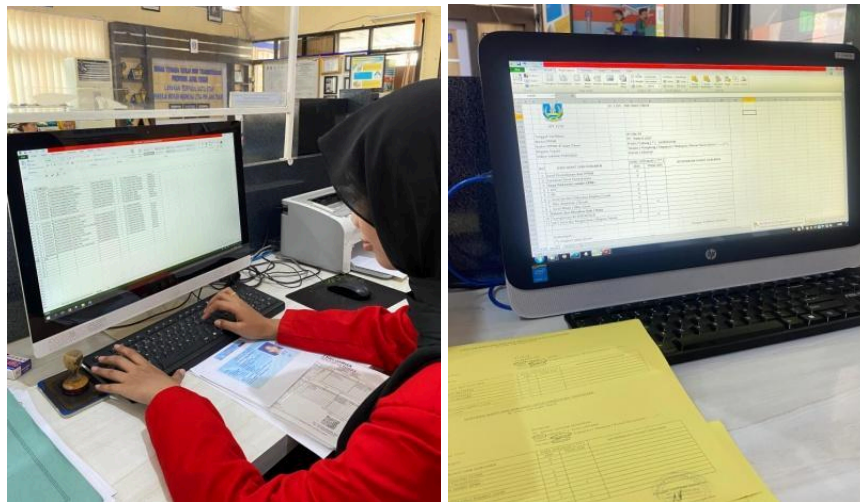
Selama saya magang di Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI), saya membantu memberikan pendampingan pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi yang diberikan oleh (LTSA-P2MI) kepada masyarakat merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa calon pekerja migran dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah dan efisien. Proses administrasi ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pendaftaran, pengumpulan dokumen, hingga penyelesaian proses yang diperlukan sebelum keberangkatan. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengumpulan dokumen dan memastikan keberangkatan calon pekerja sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pelayanan LTSA- PMI merupakan sistem yang dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi dan layanan bagi Pekerja Migran Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai layanan dan dokumen yang diperlukan dalam satu tempat, sehingga mengurangi birokrasi yang sering membuat proses menjadi rumit dan memakan waktu. Kegiatan magang disini saya ditempatkan diloket I dan loket III.

Loket 1 adalah pusat layanan administrasi yang memiliki beberapa fungsi penting. Pelayanan tersebut mencakup beberapa pengurusan dokumen antara lain:

- Pengurusan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI): Memproses pembuatan ID bagi calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri.
- Rekomendasi Paspor: Membantu dalam pengajuan rekomendasi paspor dengan mengisi formulir verifikasi paspor. Proses ini mencakup pengecekan kelengkapan dokumen untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum keberangkatan.
- Penghapusan Status PMI: Melayani penghapusan status PMI bagi pekerja yang telah kembali dan ingin menghapus status tersebut dari sistem untuk keperluan perjalanan selanjutnya.
- Pengaduan Layanan dan Informasi Kerja: Menyediakan saluran bagi calon pekerja untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan mengenai proses kerja di luar negeri.

Pelayanan loket III berfokus pada layanan administrasi yang berkaitan dengan pengecekan data kependudukan secara online. Pengecekan data tersebut berupa dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Sejahtera (KSK), dan akte kelahiran. Verifikasi data ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan akurat dan lengkap sebelum diajukan ke pihak imigrasi. Proses ini sangat penting, karena persetujuan pengurusan dokumen ke imigrasi sangat bergantung pada kevalidan data kependudukan yang diperoleh.



**Gambar 1. Pelayanan Administrasi LTSA-P2MI**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain itu, LTSA-P2MI juga menyediakan layanan konsultasi bagi calon pekerja migran. Melalui sesi konsultasi, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang berbagai pilihan pekerjaan, risiko yang mungkin dihadapi, serta hak-hak yang harus diperoleh. Petugas yang berpengalaman siap memberikan penjelasan mendetail dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul, sehingga calon pekerja migran merasa lebih yakin dan siap sebelum mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri. Dalam aspek pemantauan dan perlindungan, LTSA-P2MI juga berperan dalam menciptakan sistem administrasi yang transparan. Mereka mencatat setiap langkah yang diambil dalam proses pengiriman pekerja migran, mulai dari tahap perekrutan hingga keberangkatan.



**Gambar 2. Layanan Konsultasi Calon Pekerja Migran**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dengan adanya sistem administrasi yang terintegrasi, LTSA-P2MI tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Melalui pendekatan yang transparan dan informatif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses dan merasa aman dalam memilih untuk menjadi pekerja migran, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

## KESIMPULAN dan SARAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang berperan dalam pengelolaan tenaga kerja dan transmigrasi di wilayah Jawa Timur. Dalam mendukung upaya perlindungan dan pendampingan pekerja migran Indonesia, Disnakertrans Jatim mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-P2MI). LTSA-P2MI berfungsi sebagai pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari informasi tentang peluang kerja di luar negeri, prosedur perekrutan, pengurusan dokumen-dokumen pekerja, hingga perlindungan hak-hak pekerja migran. Melalui kegiatan pelayanan yang dilakukan penulis untuk kepengurusan dokumen para pekerja migran berhasil menciptakan lingkungan yang sadar pentingnya pendaftaran kerja luar negeri secara legal. Dengan adanya LTSA-P2MI masyarakat semakin mudah untuk mencari informasi dan meminta bantuann pengurusan dokumen untuk kepentingan pencarian pekerjaan diluar negeri sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah penulis lakukan, terdapat saran yaitu dengan banyaknya peningkatan pemohon yang ingin melakukan veritifikasi paspor atau kepengurusan dokumen lainnya, diharapkan dapat diiringi oleh system arsip secara elektronik guna memudahkan pencarian dan pengarsipan dokumen para pekerja migran. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Malik, Nazaruddin. 2016. *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No 62 Tahun 2018 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil
- Risky Raynambus. Dkk. (2020) *Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Penyediaan Informasi Pasar Tenaga Kerja Bagi Pencari Kerja di Kabupaten Kutai Barat*.
- Stress, M Richard. *Efektivitas Organisasi*. ( Jakarta: Erlangga 1985) hal.53
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1996), hal 15.
- Undang – Undang No . 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenagakerjaan.